

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5.
- _____. *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1.
- _____. *Peraturan Bupati Bogor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah*. Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2022.
- _____. *Peraturan LKPP tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*. Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018.
- _____. *Peraturan LKPP tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa*. Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
- _____. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pelayanan Publik*, Permen PAN Nomor 63 tahun 2003.
- _____. *Peraturan Menteri tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*. PerMenPANRB No. 17 Tahun 2017.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pasal 75.

_____. *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

B. Buku

Abdul Mahsyar, *Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Asmawi Rewansyah. *Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance*. Jakarta; PT Rizky Grafis, 2009.

BAGIAN KESATU NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK, Jakarta 2021, hlm 79.

Dahyar Daraba. *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Makassar: Leisyah, 2019.

Komarudin, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Genesindo, 2014.

Lembaga Administrasi Negara RI, *SANKRI: Buku III Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Perkembangan Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2004.

Lewis, Carol W & Stuart C. Gilman. *The Ethnic Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. San Fransisco: Jossey-Bass, 2005.

Marzuqi Yahya dan Endah Fitri Susanti, *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah SESUAI DENGAN PERPRES* . Jakarta: Laskar Aksara, 2012.

Miftah Thoha. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Muhammad Fitri Rahmadana et.al., *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta: PT.Refika Aditama, 2009.

Pasalong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Rahman Mulyawan, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press, 2016.

Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Makassar: Bumi Aksara, 2014.

Ulber Silalahi, Wirman Syafri, *DESENTRALISASI DAN DEMOKRASI PELAYANAN PUBLIK Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Sumedang: IPDN Press, 2015.

A. Lain-lain

Anonim. "Indonesia". Tersedia di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. diakses tanggal 30 Maret 2022 pukul 07.52.

Anonim, "Terbaru: Permendagri 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UKPBJ", <https://www.pengadaan.web.id/2018/11/permendagri-112-tahun-2018-tentang-pembentukan-ukpbj.html?m=1> diakses tanggal 30 Mei 2022 pukul 08.01.

Anonim, "Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/UnitKerjaPengadaanBarang/Jasa> diakses tanggal 19 Mei 2022 pukul 11.40.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia "Online Single Submission" <https://kek.go.id/online-single-submission> diakses tanggal 8 Juni 2022 pukul 10.15.

Dwi Dhayanty, *Jurnal Perbanas*: Jakarta, 2015.

Diding Rahmat, *Jurnal Unifikasi*: Jakarta, 1 Januari 2017 Vol 04.

Disnakerpmtsp, "Pelayanan Publik", <https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id/?p=6205> diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 15.00.

Edi Suharman, *Jurnal IUS “Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”*:Vol.V., Nomor 2 Agustus 2017.

Fadilla Suronoto, *Gorontalo Law Review Kewenangan Institusi dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik*: Vol. 3. Oktober 2020.

Harius Eko Saputro, *Jurnal Professional FIS UNIVED Kualitas Pelayanan Publik*, Vol.2. Nomor 1 Juni 2015.

Irwan et al., *Jurnal Moderat Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat*; Volume 5, Nomor 1, 1 Februari 2019.

Kementerian Investasi/BKPM, “Migrasi Data dari OSS 1.1” <https://oss.go.id/> diakses tanggal 8 Juni 2022 pukul.10.00.

Muslimin B Putra, “Mengetahui Pelayanan Publik” , <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengetahui-pelayanan-publik> diakses tanggal 28 April 2022 pukul 07.14.

PUSDIKLAT “Bimtek Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah” <https://diklat.net/2021/03/22/bimtek-perpres-no-12-tahun-2021-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah/> diakses tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00.

PUSDIKLAT“PBJ‘PelatihanPengadaanBarang/Jasa”<https://elearning.lkpp.go.id/course/index.php?categoryid=2> diakses tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00.

Putra, I Ketut Cahyadi, *Udayana Master Law Journal Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfarestate dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik diIndonesia*; Bali,Vol.6,No. 1:1-12, 2017.

Situmorang, Chazali H, *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi*; Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019.